

BAB I

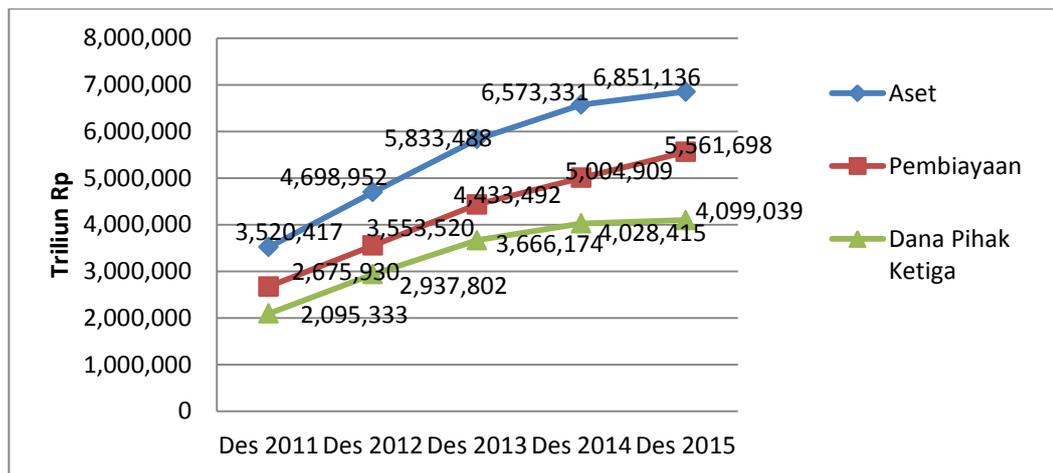
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali mendapatkan izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. BPRS menjadi pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi (Ansori, 2009 : 32).

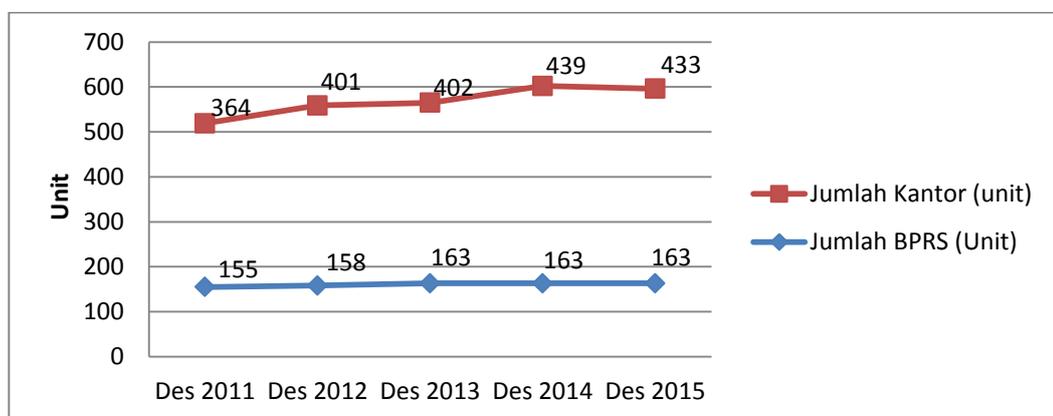
Perkembangan BPRS dalam periode lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS memberikan andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian terutama ekonomi skala kecil. Kondisi ini dibuktikan dengan perkembangan aset, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan penyaluran pembiayaan serta jumlah per unit pada tahun 2011- 2015. BPRS sebagai salah

satu lembaga keuangan syariah yang mengalami peningkatan, memberikan gambaran peluang dan potensi untuk terus dikembangkan. BPRS menjadi alternatif lembaga keuangan konvensional terutama pada skala kecil dalam mengembangkan sektor real perekonomian pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan BPRS bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015

Gambar 1. 1 Perkembangan Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BPRS di Indonesia (2011-2015)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015

Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah BPRS di Indonesia (2011-2015)

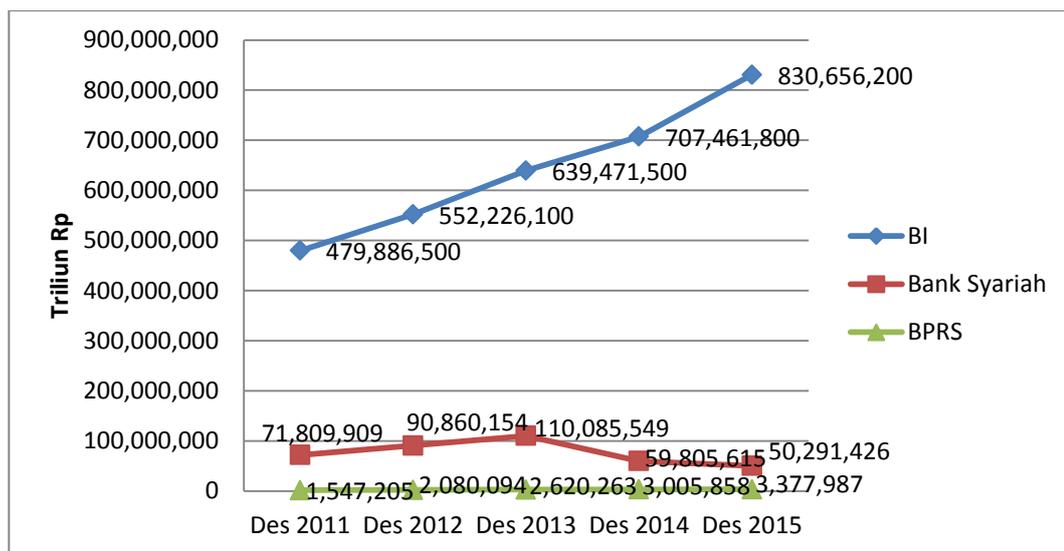
BPRS sebagai lembaga intermediasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Lapisan ekonomi terkecil adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pentingnya meningkatkan kinerja BPRS salah satunya yaitu untuk memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber dana bagi UMKM yang memiliki bagian besar dalam laju perekonomian bangsa. UMKM menjadi prioritas bisnis bagi BPRS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memberikan gambaran bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional dan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian.

UMKM Indonesia harus terus ditingkatkan mengingat sejak tahun 2015 Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadi tantangan baru bagi para pelaku UMKM. Salah satu cara untuk meningkatkan UMKM adalah memberikan permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM.

BPRS merupakan salah satu sumber dana untuk UMKM. berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) per Desember 2015, penyaluran pembiayaan BPRS pada UMKM mencapai Rp 3,377 triliun. Jumlah ini selalu meningkat pada setiap tahunnya. sebelumnya pada periode per Desember 2014 penyaluran

pembiayaan BPRS pada UMKM mencapai Rp 3,005 triliun, terdapat peningkatan sekitar 12,3 persen.

Data perkembangan penyaluran pembiayaan pada UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara keseluruhan, Bank Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Bank Indonesia 2015

Gambar 1. 3 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan pada UMKM (2011-2015)

Pembiayaan BPRS pada UMKM memiliki nilai yang masih rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah pada periode yang sama, hanya sekitar 1,3 persen dari total keseluruhan pembiayaan bank syariah pada UMKM yang mencapai 50,291 triliun. Kontribusi BPRS tersebut menjadi sangat kecil lagi jika dibandingkan dengan perbankan nasional yang mencapai 830,656 triliun. Penyaluran pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS belum maksimal hanya sekitar 0,44 persen saja dari total seluruh penyaluran pembiayaan UMKM.

Secara umum dapat disimpulkan kinerja BPRS dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM masih rendah, apalagi jika dibandingkan dengan total penyaluran pembiayaan Bank Indonesia dan belum maksimal jika dibandingkan dengan peluang dan tantangan yang ada. Peluang penyaluran pembiayaan terhadap UMKM cukup besar. Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh, sedangkan BPRS belum mampu menggarap dengan maksimal dan tantangan BPRS dalam persaingan dengan lembaga keuangan lain. Pencapaian kinerja BPRS yang sehat, kuat dan terpercaya diperlukan agar dapat meraih peluang dan menghadapi tantangan tersebut, salah satunya yaitu dengan meningkatkan efisiensi BPRS. Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang cukup populer dan banyak digunakan untuk menjawab atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan (Muhari dan Hosen, 2014 : 308).

Pengawasan dan pengukuran tingkat efisiensi kinerja pada BPRS perlu dilakukan dengan dasar untuk menjaga dan menganalisis pengembangan peran dan fungsi BPRS sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Peningkatan efisiensi pada biaya operasional akan meningkatkan profit dan peluang dalam persaingan. Hal ini sesuai dengan kondisi BPRS yang banyak bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Peningkatan efisiensi kinerja pada BPRS pun akan menarik nasabah dengan kualitas dan layanan yang ditawarkan. Kesadaran akan pentingnya efisiensi dapat membantu para regulator untuk membuat peraturan yang baik pada industri perbankan.

Efisiensi bisa terukur dengan melihat tingkat input yang ada namun ingin mendapatkan tingkat output yang optimal, atau mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat output tertentu. Proses identifikasi alokasi output dan input dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan (Hadad, 2003).

Input untuk mengetahui efisiensi kinerja BPRS yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional BPRS. DPK merupakan sumber dana utama bagi BPRS yang diperoleh dari masyarakat. BPRS memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pengelolaan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut menjadi ukuran keberhasilan BPRS. Input selanjutnya adalah biaya operasional dan pengelolaan biaya operasional menjadi ukuran efisiensi kinerja BPRS.

Pengukuran efisiensi pada BPRS penting untuk dilakukan sebagai suatu parameter kinerja. Pengukuran efisiensi dapat memakai pendekatan parametrik dan non-parametrik, salah satu metode yang paling tepat dalam mengukur tingkat efisiensi dengan menggunakan metode non-parametrik yaitu dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung efisiensi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengelola efisiensi kinerjanya.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi BPRS di Indonesia secara umum.